



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dari sektor Retribusi perlu memanfaatkan pemakaian kekayaan daerah secara maksimal;
- b. bahwa kekayaan daerah yang dimanfaatkan perlu adanya kontribusi atas jasa pemakaian kekayaan daerah dalam bentuk retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 09 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 1)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah meliputi tanah, bangunan, gedung, kendaraan/alat-alat berat, mess.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
12. Kas Daerah adalah Kas milik Pemerintah Daerah.
13. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas Pemakaian kekayaan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah atas pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu, meliputi :

- a. Tanah;
- b. Bangunan;
- c. Gedung;
- d. Rumah Dinas;
- e. Kendaraan / alat-alat berat;
- f. Mess.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai Kekayaan Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan:

- a. pemakaian gedung/bangunan, type fasilitas milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan lokasi, luas, fasilitas, dan waktu pemakaian;
- b. pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah berdasarkan lokasi, luas tanah, dan peruntukannya serta waktu pemakaian;
- c. pemakaian kendaraan/alat-alat berat berdasarkan jenis dan waktu pemakaian.
- d. Pemakaian mess berdasarkan fasilitas dan lamanya menginap.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Stuktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	BESARNYA TARIF (Rp)	PENGHITUNGAN TARIF	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	
A	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH			
1.	Tanah			
	a. Lingkungan Ibukota Kabupaten (dalam batas kota);			
	1) untuk usaha	Rp. 30.000,-	Per M ² / bulan	-
	2) tanah dan bangunan	Rp. 750.000,-	Per-bulan	-
	b. Lingkungan Ibukota Kecamatan (dalam batas kota);			
	1) untuk usaha	Rp. 22.500,-	Per M ² / bulan	-
	2) tanah dan bangunan	Rp. 450.000,-	Per-bulan	-
	c. Kelurahan/Desa - untuk usaha	Rp. 22.500,-	Per-bulan	-
	d. Kegiatan insedentil/pameran			
	1) ibukota kabupaten	Rp. 250.000,-	Per-minggu	Pemakaian dibawah 6 (enam) hari tetap dikenakan tarif perminggu
	2) ibukota kecamatan	Rp. 200.000,-	Per-minggu	
2.	Gedung Seraba Kawa			
	a. Kegiatan Sosial	-		
	1) siang hari	Rp. 500.000,-	Satu x pemakaian	Jam 06.00-18.00
	2) malam hari	Rp. 650.000,-	Satu x pemakaian	Jam 18.00-06.00
	b. Kegiatan Komersil			
	1) siang hari	Rp. 1.000.000,-	Satu x pemakaian	Jam 06.00-18.00
	2) malam hari	Rp. 1.500.000,-	Satu x pemakaian	Jam 18.00-06.00
3.	Bangunan Penunjang Gedung Sarabakawa (kantin)	Rp. 1.500.000,-	Per-tahun	
4.	Bangunan Klinik Uma'iya	Rp. 7.500.000,-	Per-bulan	
5.	Gedung Pusat Informasi Pembangunan			
	a. Kegiatan Sosial			
	1) siang hari	Rp. 500.000,-	Satu x pemakaian	Jam 06.00-18.00
	2) malam hari	Rp. 650.000,-	Satu x pemakaian	Jam 18.00-06.00
	b. Kegiatan Komersil			
	1) siang hari	Rp. 1.000.000,-	Satu x pemakaian	Jam 06.00-18.00
	2) malam hari	Rp. 1.500.000,-	Satu x pemakaian	Jam 18.00-06.00
6.	Gedung Joeang Kabupaten Tabalong			
	a. Kegiatan Sosial	-	-	-
	1) siang hari	Rp. 500.000,-	Satu x pemakaian	Jam 06.00-18.00
	2) malam hari	Rp. 650.000,-	Satu x pemakaian	Jam 18.00-06.00
	b. Kegiatan Komersil			
	1) siang hari	Rp. 1.000.000,-	Satu x pemakaian	Jam 06.00-18.00
	2) malam hari	Rp. 1.500.000,-	Satu x pemakaian	Jam 18.00-06.00

7.	Bangunan Milik Daerah (Perumahan Daerah)			
a.	Permanen			
	1) type VIP	Rp. 750.000,-	Per-bulan	-
	2) type A	Rp. 600.000,-	Per-bulan	-
	3) type B	Rp. 500.000,-	Per-bulan	-
	4) type C	Rp. 400.000,-	Per-bulan	-
	5) type D	Rp. 300.000,-	Per-bulan	-
b.	Semi Permanen			
	1) type A	Rp. 200.000,-	Per-bulan	-
	2) type B	Rp. 150.000,-	Per-bulan	-
	3) type C	Rp. 100.000,-	Per-bulan	-
c.	Non Permanen/Kayu Biasa	Rp. 75.000,-	Per-bulan	-
8.	Alat-Alat Berat / Alat- Alat Besar :			
a.	Bulldoser Case 1150 G	Rp. 150.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
b.	Motor Greder Mitsubishi	Rp. 100.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
c.	Motor Greder Komatshu D.313.A	Rp. 75.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
d.	Stone Crusher Bukaka Bsc.30.T	Rp. 155.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
e.	Wheel Loader Kawasaki	Rp. 135.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
f.	Wheel loader Isuzu TCM	Rp. 65.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
g.	Tyre Roller Bukaka BTR 85-120	Rp. 30.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
h.	Roller Three wheel Barata 8-10T	Rp. 60.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
i.	Roller Three BRR & TW	Rp. 75.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
j.	Roller Three Whell Barata 6T	Rp. 25.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
k.	Tandem Roller 2,5 T (2 Unit)	Rp. 20.000,-	Per-jam/unit	Dihitung min 7 jam/hari
l.	Roller Pneumatic Dynapac 4,5 T	Rp. 40.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
m.	Hand Vibro Roller Meiwa MG. 7	Rp. 25.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
n.	Tamper Rammer Meiho 5 Hp	Rp. 15.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
o.	Motor Crane Toyota By-42	Rp. 45.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
p.	Compressor Atlas Copco	Rp. 20.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
q.	Excavator Komatshu PC 200	Rp. 225.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
r.	Tandem Vibratory Roller Barata MGD – 4	Rp. 150.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
s.	Roller Three Wheel Barata MG – 6 M	Rp. 90.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
t.	Pencampuran Aspal Panas Freddy Max	Rp. 15.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari

u.	Dump Truck Isuzu Bison 10Ps	Rp. 150.000,-	Per- hari	Pemakaian max 7 jam/hari
v.	Drump Truck Isuzu elf 120 Ps	Rp. 150.000,-	Per- hari	Pemakaian max 7 jam/hari
w.	Dump Mitsubishi 120 Ps 120	Rp. 150.000,-	Per- hari	Pemakaian max 7 jam/hari

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi adalah didaerah.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan pembayaran harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.

Pasal 12

Hasil pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB XIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan Tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan peraturan bupati.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - memeriksa buku-buku, catatan - catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan penyidikan; dan/atau
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang mengatur tentang retribusi daerah khususnya Tanah, Gedung Saraba Kawa, Bangunan Penunjang Gedung Seraba Kawa (kantin), Bangunan Klinik Uma'iyah, Gedung Pusat Informasi, Gedung Joeang Kabupaten Tabalong, Bangunan Milik Pemerintah Daerah dan Alat-Alat Berat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2001, seri C Nomor seri 02), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2008 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 02 Agustus 2010

BUPATI TABALONG,



H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 02 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDEL FADILLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2010 NOMOR .1.1